

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memiliki garis pantai sepanjang 99.083 km terpanjang kedua di dunia menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang luar biasa. Luas wilayah laut lebih dari 5,9 juta km², termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), menjadikan Indonesia sebagai negara maritim utama dengan kekayaan hayati laut yang melimpah.¹

Usaha untuk memastikan kesejahteraan berkelanjutan bagi penduduk pesisir, pemerintah menjadikan pembangunan Ekonomi Biru, atau *Blue Economy*, sebagai prioritas utama. Penangkapan ikan terukur, budidaya ramah lingkungan, pengelolaan pesisir, dan penanganan sampah laut adalah lima kebijakan Ekonomi Biru yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengutamakan ekologi. Sektor perikanan mengalami pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,25% pada triwulan ketiga tahun 2024, yang merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai 407 triliun, dan kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 2,54%.²

Namun, masalah utama di sektor kelautan dan perikanan adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah, yang menghambat pemanfaatan potensi secara modern dan berkelanjutan. Kondisi sumber daya manusia masyarakat pesisir masih memprihatinkan, dengan kompetensi yang terbatas, akses terhadap teknologi, dan produktivitas yang rendah, sehingga eksploitasi sumber daya seringkali tidak optimal dan tidak ramah lingkungan.³

¹Badan Informasi Geospasial (BIG), "Informasi Geospasial Untuk Pembangunan Kemaritiman," 2014.

²Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), "Kebijakan Ekonomi Biru," 2024.

³Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), "Laporan Kinerja BPSDM KP," 2024.

Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan sebagai pilar utama dalam pengembangan kompetensi masyarakat. KKP berfokus pada pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan sertifikasi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing di pasar global.⁴

Pendidikan masyarakat sebuah metode nonformal, memainkan peran penting dalam pemberdayaan masyarakat pesisir. Penmas berfokus pada pembelajaran sepanjang hayat, pengembangan keterampilan hidup, dan pemberdayaan.⁵ Pendidikan masyarakat diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih aktif, mandiri, dan adaptif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dengan menggunakan pendekatan yang partisipatif.

Pelaku utama sektor kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya, dan pengolah hasil perikanan, melihat pelatihan sebagai alat strategis dalam proses transfer teknologi dan peningkatan keterampilan hidup. Pelatihan tematik diharapkan memberi peserta pengetahuan dan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam aktivitas kerja sehari-hari. Diharapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil usaha, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha perikanan.⁶

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan KKP menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan. Salah satu divisi utamanya adalah Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal. Didirikan sejak 1971, BPPP menyediakan program pelatihan tematik seperti penangkapan ikan, budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan pergaraman untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.⁷

⁴Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), "Sejarah Dan Tugas KKP," 2025.

⁵Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (BPPSDM KP), "Program Penyuluhan Dan Pelatihan," 2024.

⁶Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), "Program Pelatihan Masyarakat KP" (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024).

⁷Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), "Pusat Pelatihan KP," 2025.

Program pelatihan ini belum pernah dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait dampak perubahan perilaku peserta dan hasil ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan di BPPP Tegal. Penelitian ini menganalisis data sebelum pelatihan (T0) dan 6 bulan setelah pelatihan (T1), dengan mempertimbangkan perubahan pada aspek kualitas produk, penerapan keamanan pangan, efektivitas proses kerja, serta manfaat yang dirasakan oleh unit kerja atau usaha setelah mengikuti pelatihan.⁸

Program pelatihan tematik Kelautan dan Perikanan (KP) yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal mencakup empat bidang utama, yaitu Penangkapan Ikan, Budidaya Perikanan, Pengolahan Hasil Perikanan, dan Pergaraman. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan teknis spesifik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah kerja BPPP Tegal di Jawa Tengah dan sekitarnya. Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2023), pelatihan tematik ini telah menjangkau ribuan pelaku utama perikanan setiap tahun dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor perikanan secara berkelanjutan.⁹

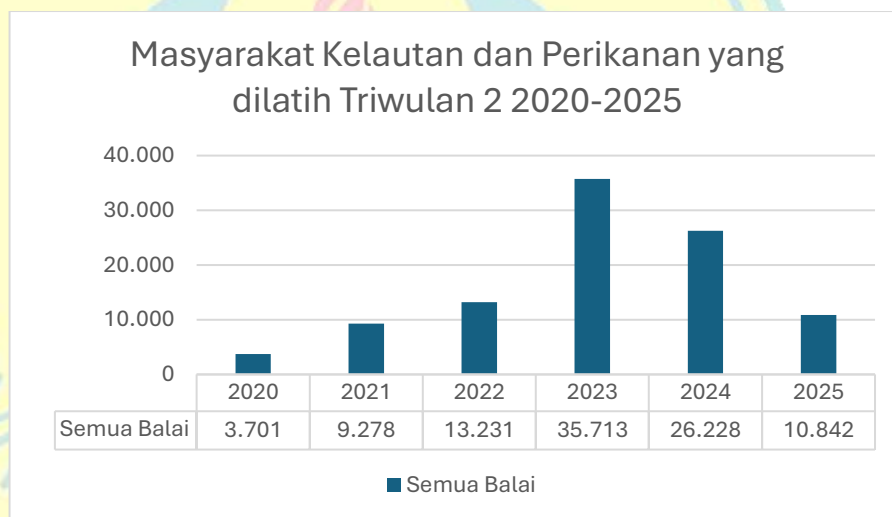
Mengingat kehilangan hasil pasca panen, yang tinggi di Indonesia, pengolahan hasil perikanan adalah salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus. Data FAO pada 2022 menunjukkan bahwa kehilangan hasil perikanan di negara berkembang seperti Indonesia berkisar antara 20 dan 35 persen dari total tangkapan. Hal ini terutama disebabkan oleh kekurangan infrastruktur dan pengetahuan pengolahan yang buruk.¹⁰ Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, meningkatkan kemampuan pengolahan hasil perikanan dapat mengurangi kehilangan setelah panen hingga 15% dan meningkatkan nilai tambah produk hingga 30 hingga 50 persen.

⁸Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, "Profil BPPP Tegal," 2025.

⁹ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), "Laporan Program Pelatihan Tematik," 2023.

¹⁰ Food and Agriculture Organization (FAO), "Post-Harvest Losses in Fisheries" (FAO, 2022).

Meskipun program telah dilakukan secara teratur, banyak alumni yang tidak melanjutkan atau mengembangkan usaha mereka setelah program berakhir, data capaian Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Puslat KP) pada triwulan II tahun 2025 menunjukkan bahwa 10.842 masyarakat kelautan dan perikanan telah menyelesaikan program pelatihan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP tahun 2022, kurangnya pendampingan lanjutan, pasar, dan akses modal menyebabkan sekitar 40 hingga 60 persen peserta pelatihan tidak lagi terlibat dalam usaha perikanan dalam waktu satu tahun setelah pelatihan.¹¹



Gambar 1. 1 Grafik Data Masyarakat KP yang dilatih

Mengingat besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk program pelatihan, diperlukan evaluasi program pelatihan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengalokasikan lebih dari Rp 1,4 triliun untuk pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pada tahun 2024 (KKP, 2024). Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Kinerja dan Anggaran, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan akuntabilitas publik dan efektivitas penggunaan anggaran.¹²

¹¹Badan Penyuluhan dan Pengembangan S D M K P (BPSPDM KP), “Studi Pasca Pelatihan” (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022).

¹²Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), “Anggaran Pelatihan Dan Pendidikan” (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2024).

Implementasi *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) kini menjadi acuan baku secara global dalam menggaransi keamanan produk pangan, terutama pada sektor pengolahan perikanan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Thailand, dan Jepang telah mengadopsi kerangka kerja ini secara masif dalam sistem pengawasan mereka. Di Amerika Serikat, *Food and Drug Administration* (FDA) rutin mengevaluasi penerapan *Seafood HACCP Program* guna menjamin kepatuhan industri terhadap standar keamanan produk.¹³ Di sisi lain, Thailand mengoptimalkan HACCP untuk menguji mutu sekaligus menembus pasar ekspor global.¹⁴ Sementara itu, Jepang memberlakukan HACCP secara ketat guna mengimbangi tingginya konsumsi olahan mentah, yang menuntut konsistensi pengawasan dari tenaga kerja yang betul-betul kompeten.¹⁵

Pembelajaran dari berbagai negara tersebut menegaskan bahwa efektivitas penerapan HACCP tak sekadar bertumpu pada regulasi, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan. Atas dasar itu, penyelenggaraan pelatihan HACCP wajib dibersamai dengan evaluasi yang menyeluruh. Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta, perubahan perilaku di tempat kerja, hingga dampaknya terhadap kinerja nyata pascapelatihan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap Program Pelatihan HACCP di BPPP Tegal menjadi krusial untuk menilai sejauh mana efektivitas program tersebut, sekaligus memberi rekomendasi konkret bagi penyempurnaan pelatihan ke depan.

Sebagian besar evaluasi pelatihan yang dilakukan selama ini bersifat konvensional dan hanya mencakup Level 1 model Kirkpatrick, yaitu reaksi atau kepuasan peserta terhadap pelatihan. Menurut Kirkpatrick & Kirkpatrick, evaluasi pada level ini evaluasi tersebut hanya mengukur

¹³ U S Food and Drug Administration, "FDA's Evaluation of the Seafood HACCP Program for Fiscal Years 2006 - 2014" (U.S. Food and Drug Administration, 2015).

¹⁴ Kanokwan Kingphadung and Woraruthai Choothian, "CHALLENGES OF HACCP IMPLEMENTATION IN AGRICULTURAL FOOD PRODUCTS IN THAILAND," *International Journal of GEOMATE* 12, no. 30 (2017): 102–8, <https://doi.org/10.21660/2017.30.2583>.

¹⁵ Masaki Kaneniwa and Masataka Satomi, "Seafood Quality Assurance Program for Small-Medium Enterprises in Japan," *Fish People* 5, no. 2 (2007): 28–32.

seberapa baik para peserta menyukai pelatihan, tanpa memberikan informasi apakah mereka benar-benar mempelajari materi atau terjadi perubahan perilaku. Pendekatan ini cenderung bersifat administratif dan kurang memberikan gambaran tentang dampak nyata program.¹⁶

Salah satu kelemahan utama adalah ketiadaan data objektif mengenai perubahan perilaku kerja (*behavior*) peserta di lapangan secara jangka panjang. Studi oleh Supriyanto tentang evaluasi pelatihan perikanan di Jawa Tengah menyimpulkan bahwa “kurangnya pengukuran Level 3 dan Level 4 Kirkpatrick menyebabkan sulitnya mengetahui apakah pelatihan benar-benar mengubah praktik kerja peserta di lapangan”.¹⁷

Selain itu, data awal (baseline/T0) sebelum pelatihan seringkali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit dilakukan perbandingan yang valid. Menurut panduan evaluasi program Kementerian Keuangan, “tanpa data baseline yang akurat, hasil evaluasi pasca intervensi tidak dapat dianggap kredibel karena tidak ada titik banding yang jelas”.¹⁸

Oleh karena itu, evaluasi dengan jeda waktu 6 bulan pasca pelatihan (T1) sangat penting untuk mengetahui keberlanjutan dan dampak nyata dari pelatihan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Phillips dan Phillips (2016), pengukuran pada 3–6 bulan pasca pelatihan merupakan waktu optimal untuk menilai transfer pembelajaran ke perilaku kerja sehari-hari, karena selama periode ini peserta memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari di tempat kerja atau tempat usaha mereka.¹⁹

Ada perbedaan yang mencolok antara jumlah sertifikat yang diterbitkan dan jumlah bisnis perikanan baru yang muncul. Menurut data BPSDM KP, lebih dari 15.000 sertifikat pelatihan diterbitkan setiap tahun. Namun, hanya sekitar 10–15 persen peserta yang berhasil mendirikan atau

¹⁶ Donald L Kirkpatrick and James D Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels*, 3rd ed. (San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2006).

¹⁷ Supriyanto and others, “Evaluasi Pelatihan Perikanan Di Jawa Tengah,” *Jurnal Terkait Evaluasi Pelatihan*, 2021, 145.

¹⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Panduan Evaluasi Program” (Kementerian Keuangan, 2020).

¹⁹ Jack J Phillips and Patricia Pulliam Phillips, *Handbook of Training Evaluation and Measurement Methods* (Routledge or similar, 2016).

membangun bisnis baru dalam dua tahun setelah pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami apa yang menghalangi transformasi pelatihan menjadi wirausaha berkelanjutan.²⁰

Penelitian ini menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick sebagai kerangka kerja yang lengkap untuk mengatasi keterbatasan evaluasi konvensional tersebut. Model ini, pertama kali diperkenalkan oleh Donald L. Kirkpatrick pada tahun 1959 melalui seri artikelnya di *Training and Development Journal*, menyediakan empat level evaluasi yang saling terkait dan hierarkis. Menurut Kirkpatrick model ini dimaksudkan untuk mengukur kepuasan peserta dan dampak pada organisasi.²¹

Level 3 memberikan perhatian khusus kepada perilaku, yang menilai sejauh mana peserta menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh di tempat kerja sehari-hari. Menurut Kirkpatrick, Level 3 *measures the transfer of learning to the job*, perubahan perilaku merupakan metrik penting untuk keberhasilan transfer pembelajaran. Level ini penting dalam pelatihan masyarakat perikanan karena menentukan apakah peserta benar-benar mengadopsi teknik baru dalam penangkapan, budidaya, dan pengolahan hasil.²²

Level 4 (*Result*) berfokus pada hasil akhir atau dampak pelatihan setelah peserta menerapkan kompetensi yang diperoleh di lingkungan kerja. Menurut Kirkpatrick dan Kirkpatrick, Level 4 mengukur final *results* yang terjadi sebagai akibat dari pelaksanaan program pelatihan. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum pelatihan (T0) dan enam bulan setelah pelatihan (T1) berdasarkan aspek kualitas produk, penerapan keamanan pangan, efektivitas proses kerja, serta manfaat penerapan HACCP bagi unit kerja atau usaha.

²⁰Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP (BPSDM KP), "Data Sertifikasi Pelatihan," 2023.

²¹Donald L Kirkpatrick, "Techniques for Evaluating Training Programs," *Journal of the American Society of Training Directors* 13 (1959): 21–26.

²² Kirkpatrick and Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels*, 2006.

Mengkomparasi kondisi penerapan prinsip analisis bahaya dan titik kontrol kritis (HACCP) sebelum dan setelah pelatihan (T0) sangat penting karena dapat menunjukkan bagaimana pelatihan berdampak pada peningkatan penerapan sistem keamanan pangan dan pengendalian mutu oleh peserta di lingkungan kerja. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dalam Circular FAO Fisheries and Aquaculture No. 1129, perbandingan dasar data seperti ini dapat menunjukkan peningkatan omset antara 20 dan 30 persen pada pelatihan pengolahan hasil perikanan di Indonesia.²³

Salah satu cara untuk menunjukkan peningkatan kompetensi teknis peserta adalah dengan melakukan analisis tentang perubahan dalam skala produksi dan tampilan produk. Perbaikan tampilan produk, seperti kualitas dan kemasan, seringkali meningkatkan nilai jual. Penelitian KKP pada tahun 2023 menemukan bahwa pelatihan pengolahan dapat mengurangi kehilangan setelah panen dan meningkatkan skala produksi kecil hingga 15 hingga 25 persen.²⁴

Keberhasilan elemen pelatihan manajemen dapat ditunjukkan dengan memperluas jangkauan pemasaran, seperti mendapatkan akses ke pasar internet atau membeli barang grosir baru. Laporan BPSDM KP tahun 2023 menunjukkan bahwa peserta yang berhasil memperluas pemasaran pasca pelatihan menghasilkan peningkatan omset rata-rata 40%. Ini menunjukkan bahwa transfer keterampilan manajemen efektif.²⁵

Pemilihan BPPP Tegal sebagai lokus penelitian didasarkan pada kesesuaiannya dengan masyarakat pesisir Utara Jawa. Sebagai salah satu UPT Puslatluh KP sejak awal pembentukan balai pelatihan perikanan (cikal bakal sejak 1971), BPPP Tegal melayani wilayah Jawa Tengah dengan fokus pada pelatihan tematik yang sesuai dengan kondisi pesisir Pantura, seperti

²³ Wibowo and others, "FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1129," 2017.

²⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), "Laporan Pengolahan Hasil Perikanan" (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2023).

²⁵ Badan Penyuluhan dan Pengembangan S D M K P (BPSDM KP), "Laporan Pasca Pelatihan" (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023).

masalah abrasi dan produktivitas perikanan tangkap (situs resmi BPPP Tegal, 2025; KKP, 2024).²⁶



Gambar 1. 2 Data Lulusan Pelatihan

Peneliti menemukan adanya gap penelitian mendasar dalam penelitian sebelumnya tentang program pelatihan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP). Sebagian besar studi evaluasi sebelumnya cenderung berfokus secara parsial, yaitu hanya terbatas pada evaluasi tingkat pertama (*Reaction*) untuk mengukur kepuasan peserta terhadap fasilitator dan sarana prasarana atau evaluasi tingkat kedua (*Learning*) untuk melihat dinamika nilai pre-test dan post-test. Pada tingkat ini, evaluasi belum dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang efektivitas jangka panjang dan dampak nyata dari pelaksanaan program di Tengah Masyarakat perikanan.

Studi sebelumnya hampir tidak pernah melacak keberlanjutan program sebelum mencapai evaluasi tingkat ketiga (*behavior*) untuk mengevaluasi perubahan dalam perilaku kerja dan evaluasi tingkat keempat (*result*) untuk mengukur dampak finansial yang nyata dari peningkatan pendapatan alumni pelatihan. Karena keterbatasan evaluasi menyeluruh ini, para pengambil kebijakan menghadapi kesulitan untuk menentukan apakah program intervensi yang telah menghabiskan anggaran negara tersebut

²⁶ Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, "Profil BPPP Tegal."

benar-benar menghasilkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan atau sekadar hasil administratif sesaat. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menerapkan Model Evaluasi Kirkpatrick secara menyeluruh pada Level 1, 2, 3, dan 4. Untuk membuktikan dampak langsung dan keberlanjutan dari Pelatihan *Hazard Analysis and Critical Control Point* di BPPP Tegal, desain komparatif T0 (sebelum pelatihan) dan T1 (6 bulan pascapelatihan) digunakan.

Akibatnya, penelitian ini berjudul “Evaluasi Program Pelatihan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) Menggunakan Model Evaluasi Kirkpatrick Di Pusat Pelatihan Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan”, dengan penekanan khusus pada BPPP Tegal. Hasil evaluasi berdasarkan model Kirkpatrick ini diharapkan dapat membantu KKP memperkuat program Ekonomi Biru, meningkatkan ROI pelatihan, dan mendukung masyarakat pesisir Indonesia yang sehat secara berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Belum diketahui secara pasti sejauh mana pelaksanaan pelatihan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) di BPPP Tegal berkontribusi nyata terhadap peningkatan kompetensi peserta, perubahan perilaku kerja, serta penerapan prinsip keamanan pangan dan pengendalian mutu produk setelah pelatihan dilaksanakan.
2. Belum tersedianya studi evaluasi yang secara spesifik mengkomparasi data kondisi penerapan HACCP peserta antara sebelum pelatihan (T0) dan kondisi riil 6 bulan setelah pelatihan (T1), khususnya terkait perubahan perilaku kerja serta dampaknya terhadap penerapan keamanan pangan dan pengendalian mutu produk perikanan.
3. Masih ditemukan alumni pelatihan yang telah mengikuti pelatihan Analisis Risiko dan Pusat Kontrol Kritis (HACCP) masih belum

menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan dan pengendalian mutu yang mereka pelajari selama pelatihan dalam pekerjaan sehari-hari.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi ruang lingkup evaluasinya mengingat luasnya cakupan objek di Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang tersebar di berbagai lokasi seperti BPPP Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, hingga Ambon. Oleh karena itu, lokus penelitian difokuskan secara khusus pada pelaksanaan pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal. Objek evaluasi dibatasi pada Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan tepatnya pada Pelatihan *Hazard Analysis and Critical Control Point* sebagai salah satu bagian dari Pelatihan Tematik Kelautan dan Perikanan. Pengumpulan data evaluasi dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan pasca-pelatihan. Analisis dampak dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparasi antara kondisi sebelum pelatihan (T0) dan sesudah pelatihan (T1). Fokus analisis adalah indikator hasil seperti keamanan pangan, pengendalian mutu produk, kinerja kerja, dan manfaat penerapan HACCP bagi unit kerja. Secara metodologis, penelitian ini berpusat pada Model Evaluasi Kirkpatrick untuk menilai dampak pelatihan terhadap peserta.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan/kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) meliputi aspek materi pelatihan, narasumber, metode pembelajaran, sarana prasaran dan penyelenggaraan pelatihan di BPPP Tegal? (*Reaction*)
2. Bagaimana peningkatan kompetensi peserta yang meliputi aspek pengetahuan mengenai HACCP sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan? (*Learning*)

3. Bagaimana penerapan keterampilan HACCP oleh alumni pelatihan dalam pelaksanaan pekerjaan setelah 6 bulan mengikuti pelatihan? (*Behavior*)
4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek hasil (*results*) yang meliputi keamanan pangan, pengendalian mutu produk, kinerja kerja, dan manfaat penerapan HACCP bagi unit kerja antara sebelum pelatihan (T0) dan enam bulan setelah pelatihan (T1) (*Results*)

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kepuasan dan tanggapan peserta terhadap komponen penyelenggaraan Pelatihan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), mulai dari kualitas pelatih, relevansi materi, hingga kecukupan sarana prasarana. (*Reaction*)
2. Mengukur peningkatan pengetahuan peserta mengenai HACCP sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. (*Learning*)
3. Mendeskripsikan sejauh mana alumni pelatihan menerapkan kompetensi HACCP dalam pelaksanaan pekerjaan setelah 6 bulan mengikuti pelatihan. (*Behavior*)
4. Membuktikan ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan pada aspek hasil (*results*) yang meliputi keamanan pangan, pengendalian mutu produk, kinerja kerja, dan manfaat penerapan HACCP bagi unit kerja antara sebelum pelatihan (T0) dan enam bulan setelah pelatihan (T1) (*Results*)

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu Pendidikan Masyarakat (Penmas), khususnya dalam memperkaya khazanah keilmuan bidang evaluasi program pelatihan non-formal berbasis masyarakat pesisir. Secara akademik,

hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi penting mengenai penerapan Model Evaluasi Kirkpatrick secara utuh mulai dari tingkat reaksi (*reaction*), pembelajaran (*learning*), perilaku (*behavior*), hingga hasil (*result*) untuk efektivitas program pelatihan nonformal pada sektor kelautan dan perikanan melalui penerapan model evaluasi Kirkpatrick secara utuh. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak mendalami kajian dampak pelatihan *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) terhadap peningkatan kompetensi peserta, perubahan perilaku kerja, serta penerapan system keamanan pangan dan pengendalian mutu pada sektor kelautan dan perikanan.

2. Secara Praktis

a) Bagi Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Memberikan data empiris mengenai efektivitas pelatihan secara nasional sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pelatihan masyarakat yang lebih berdampak.

b) Bagi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal

Menjadi instrumen umpan balik (*feedback*) untuk melakukan perbaikan pada unsur-unsur pelatihan (kurikulum, metode, pelatih, dan materi) agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta di lapangan.

c) Bagi Masyarakat/Peserta Pelatihan

Memberikan gambaran mengenai potret keberhasilan alumni pelatihan, sehingga dapat menjadi motivasi bagi peserta untuk terus mengembangkan usaha pengolahan hasil perikanan yang berkelanjutan.

d) Bagi Peneliti dan Universitas Negeri Jakarta

Menambah literatur hasil penelitian mahasiswa yang berkualitas dan aplikatif di bidang Pendidikan Masyarakat, serta memperkuat hubungan kemitraan antara dunia akademik dan instansi pemerintah (KKP).